

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004).

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan itu sendiri dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi. Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertambahan dari pendapatan nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang dan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan.

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan

riil perkapita (Suparmoko, 2002). Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan memberikan kehidupan yang layak sebagaimana tujuan awal didirikan Negara ini adalah memajukan dan meningkat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003 dalam Ravi, 2010).

Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga sifat penting, sifat yang *pertama* adalah suatu proses yang berarti merupakan

perubahan yang terjadi terus-menerus. *Kedua*, suatu usaha untuk menaikkan pendapatan per jiwa/*income per kapita*. *Ketiga*, adalah kenaikan *income perkapita* itu harus terus-menerus dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa (Hasibuan, 1987).

Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional Negara Republik Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan bisa memotifasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dan dilaksanakan secara terpadu, serasi dan terarah agar pembangunan di setiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah (Jhingan, 1999 dalam Yunarko, 2007). Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB) perkapita (Zaris, 1987).

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987: 82). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa (kecuali DKI Jakarta) ternyata mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah. Ini dikarenakan sedikitnya sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa. Sumber daya alam ini merupakan salah satu faktor

pendorong pertumbuhan daerah, selain pola investasi dan perkembangan prasarana transportasi (Zaris, 1987: 86). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Jawa Timur yang dikategorikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah ternyata memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur selama kurun waktu lama tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.1

Tabel 1.1
Produk Regional Domestik Bruto Per kapita Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Provinsi Di Jawa Timur Tahun 2008-2012
(dalam ribu rupiah)

Tahun	PDRB harga konstan 2000 (juta Rp)	pertumbuhan%
2008	305.538.686,62	-
2009	320.861.168,91	5,01
2010	342.280.764,89	6,67
2011	366.983.277,46	7
2012	393.666.437,38	7,27

Sumber : BPS, PDRB provinsi Jawa Timur 2013

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah PDRB daerah provinsi Jawa Timur , laju pertumbuhan terus mengalami kenaikan di tahun 2009 yaitu 5,01%, namun pencapaian cukup berhasil dengan tahun selanjutnya sebesar 6,67% dan kenaikan terus berangsur naik dengan tahun berikutnya sebesar 7% sampai di tahun 2012 terus naik dengan persentase 7,27%. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat perekonomian di Jawa Timur secara keseluruhan mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonominya cenderung positif dan kondisi tersebut akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

Berbeda dengan Todaro (2004) yang menyatakan bahwa, perekonomian yang tinggi di suatu wilayah tidak mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat wilayah tersebut. Selain itu, tingkat pertumbuhan

ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Peningkatan serta tingginya pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah diharapkan terjadi secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka dapat dilihat dari perkembangan jumlah rata-rata PDRB menurut Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah sebagai berikut

Tabel 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2007-2008
(milyar rupiah)

Provinsi	2007	2008
DKI Jakarta	332.971	353.539
Jawa Barat	274.180	290.171
Banten	65.047	68.831
Jawa Tengah	159.110	167.790
DIY	18.292	19.209
Jawa Timur	287.814	304.799

Catatan : Sumber : PDRB nasional , BPS 2007-2008

Perkembangan penerimaan daerah provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.2 dimana komposisi dan proporsi Pendapatan Asli Daerah yang digali oleh pemerintah daerah sudah mengalami peningkatan baik jumlah maupun proporsi pendapatan dari dari subsidi masih tetap naik, tetapi

proporsinya terhadap total penerimaan sudah mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2007 PAD Jawa Timur hanya Rp 287.814 (miliar) dan mengalami kenaikan tiap tahunnya hingga pada tahun 2008 telah mencapai nilai Rp 304.799 (miliar). Ini menunjukkan bahwa penggalan dana oleh pemerintah daerah propinsi melalui sumber daya asli daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Meningkatnya PAD dan penurunan proporsi tingkat subsidi diharapkan dapat menjadi sinyal bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tabel 1.3
Pendapatan Asli Daerah Daerah Jawa Timur Tahun 2008-2012
(juta rupiah)

Tahun	PAD
2008	5.212.319
2009	5.708.040
2010	7.275.089
2011	7.615.043
2012	9.068.160
jumlah	34.878.652

Sumber : jawa timur dalam angka, bps, 2008-2012

Modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan untuk daerah sendiri sehingga nantinya dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja.

Tabel 1.4
Belanja Modal Daerah Jawa Timur Tahun 2008-2012
(juta rupiah)

TAHUN	Belanja Modal
2008	6.950.644
2009	6.949.033
2010	6.324.323
2011	8.489.559
2012	10.803.001
jumlah	39.516.561

Sumber : jawa timur dalam angka, bps, 2008-2012

Dalam pembahasan sebelumnya memperlihatkan dimana belanja pemerintah sangatlah berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga sejalan dengan perkembangan Provinsi Jawa Timur akan memperlihatkan laju penerimaan serta pengeluaran pemerintah kota yang kemudian akan menopang sistem perekonomian daerah.

Tabel 1.5
Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012

tahun	SD	SMP	SMA umum	SMA kanjuruhan	diploma	universitas
2008	10.672.284	3.409.457	2.157.068	1.136.122	330.856	688.635
2009	11.112.127	3.243.997	2.199.954	1.434.937	319.303	796.404
2010	10.016.193	3.389.520	2.123.658	1.415.045	274.075	841.029
2011	10.096.064	3.486.552	2.404.259	1.455.756	299.486	806.971
2012	9.696.300	3.305.114	2.347.409	1.451.352	310.294	989.011
jumlah	51.592.968	16.834.640	11.232.348	6.893.212	1.534.014	4.122.050

Sumber : Jawa Timur dalam angka BPS , 2008-2012 di olah

Berdasarkan sumber data tenaga kerja yang di atas tingkat kelulusan SD paling banyak bekerja dengan jumlah tenaga kerja 51.592.968 dan disusul oleh tingkat SMP dengan 16.834.640 dan kemudian di tingkat SMA umum dengan jumlah 11.232.348 namun dari tingkat SMA kanjuruhan menurun lagi menjadi sebesar 6.893.212 kemudian tingkat diploma menurun juga sebesar 1.534.014 namun di tingkat universitas meningkat sebesar 4.122.050. jadi berdasarkan data di atas dari tenaga kerja dari tingkat kelulusan SD, SMP, SMA umum, SMA kanjuruhan, DIPLOMA dan Universitas adalah tingkat SD paling tinggi tenaga kerja yang di ada.

Berdasarkan urain diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Pengaruh Tingkat PDRB, Belanja Modal dan Tenaga Kerja T erhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur tahun 2008-2012”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dikemukakan masalah.

yang ingin di sampaikan, yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh tingkat PDRB, Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terhadap PAD di Jawa Timur tahun 2008-2012

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disertai dengan tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk Menganalisis Apakah Tingkat PDRB, Belanja Modal, dan Tenaga Kerja Berpengaruh Terhadap PAD Jawa Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai masukan bagi pemerintah terhadap khususnya instansi-instansi terkait.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur agar dapat mengetahui kondisi perekonomian yang sedang berjalan.
3. Untuk sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.
4. Untuk menambah wawasan penulis menyukai perekonomian Indonesia khususnya daerah jawa timur.
5. Memberikan gambaran seberapa besar kontribusi tingkat PDRB, belanja modal dan tenaga kerja terhadap PAD di Jawa Timur

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III metode penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V kesimpulan, Keterbatasan, Saran, dan Daftar Pustaka.

BAB I: PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Manfaat penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang Landasan Teori, Hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menguraikan variabel penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang Analisis Dekskriptif dan Objek Penelitian, Analisis Data, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan simpulan, Saran, dan Daftar Pustaka.